



# LABORATORIUM INDONESIA 2045

Jalan Mabes Hankam No. T65  
Bambu Apus, Cipayung, 13890  
lab45@lab45.id  
+62 811 4520 45

## Rilis Pers Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, 22 Oktober 2025 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah genap berjalan satu tahun. Hal ini menandai fase penting dalam perjalanan transformasi Indonesia. Selama masa kampanye, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan dengan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera. Satu tahun pertama ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana visi tersebut telah diimplementasikan melalui program prioritas, alokasi anggaran, dan penguatan institusi pelaksana sebagai pelajaran untuk sisa periode pemerintahan.

Dalam perjalanannya, pemerintahan Presiden Prabowo telah meluncurkan berbagai program strategis yang bertujuan memperkuat fondasi pembangunan nasional. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Program Tiga Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara dirancang dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional. Meski demikian, implementasi program-program tersebut menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penyesuaian dan penguatan.

Evaluasi komprehensif terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo perlu dilakukan segera untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan penguatan dan akselerasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera dapat terwujud, serta mendukung prospek pengembangan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya pada masa depan.

Bagi **Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45)**, evaluasi ini tidak hanya relevan untuk membaca capaian jangka pendek, tetapi juga penting untuk mengaitkan arah kebijakan pemerintah dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan melihat kesinambungan antara kebijakan hari ini dan proyeksi masa depan, LAB 45 berupaya memastikan bahwa pembangunan nasional tidak berhenti pada pencapaian tahunan, melainkan menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi di panggung global.

Evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan menilai capaian program prioritas, efektivitas implementasi, serta dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk merumuskan langkah strategis guna memperkuat pembangunan, melakukan penyesuaian kebijakan, dan mengoptimalkan peran institusi pelaksana. Selain itu, evaluasi ini berfungsi memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar arah kebijakan Presiden Prabowo dapat lebih konsisten, inklusif, dan mendapat dukungan publik yang luas.

Dalam memberikan gambaran evaluasi yang lebih komprehensif, LAB 45 berfokus untuk mengevaluasi di empat bidang utama, antara lain politik keamanan, ekonomi politik, politik media, dan pemberdayaan perempuan. Rincian lebih lanjut atas evaluasi di keempat bidang tersebut dapat ditemukan dalam bagian selanjutnya.

**Jaleswari Pramodhawardani**  
Kepala Laboratorium Indonesia 2045

## I. Evaluasi Bidang Politik Keamanan

### **Pertaruhan Presiden Prabowo dan Tantangan Menteri Purbaya: Pengadaan Alutsista dalam Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran<sup>1</sup>**

Rencana pengadaan berbagai sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu topik utama yang mewarnai satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ambisi besar untuk melakukan modernisasi postur pertahanan Indonesia menghadirkan satu pertanyaan yang tak kalah besarnya, yaitu apakah pemerintah Indonesia mampu membiayai ambisi tersebut. Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) melihat satu tahun pertama pemerintahan ini masih menyisakan banyak keraguan apakah mesin ekonomi Indonesia saat ini, yang digawangi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo, mampu menciptakan kebijakan fiskal yang tangguh dan *prudent* untuk mendanai pembangunan kekuatan pertahanan Presiden Prabowo.

Tidak bisa dipungkiri, faktor finansial akan selalu menjadi pertanyaan pembuka dalam berbagai upaya pembelian alutsista: apakah Indonesia mampu membiayainya? Misal, Kementerian Keuangan dikabarkan telah menyetujui untuk mencari pembiayaan alutsista untuk tahun 2026 sebanyak Rp160 triliun. Angka tersebut termasuk untuk beberapa pengadaan alutsista yang cukup menyita perhatian publik, seperti pesawat tempur generasi 4.5 J-10 buatan Tiongkok dengan nilai sebesar Rp26,49 triliun, pesawat tempur generasi 5 KAAAN buatan Turkiye sebesar Rp19,86 triliun, kapal perang permukaan *light frigate* I-Class dari Turkiye sebesar Rp18,21 triliun, serta kapal induk bekas Garibaldi dari Italia sebesar Rp7,45 triliun.

Serangkaian pengadaan berjumlah fantastis ini didukung oleh terobosan baru dalam mekanisme pembelian alutsista yaitu sepenuhnya menggunakan pinjaman luar negeri (PLN) yang tidak memerlukan alokasi rupiah murni pendamping (RMP). Hal ini menghadirkan fleksibilitas anggaran yang luar biasa untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melakukan pengadaan pertahanan yang telah diupayakan Prabowo semenjak dirinya menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) pada pemerintahan sebelumnya. Dalam Buku II R-APBN 2026 misalnya, disebutkan bahwa fungsi pertahanan akan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp335 triliun, padahal anggaran Kemhan yang disetujui hanyalah Rp185 triliun. Angka Rp335 triliun adalah sekitar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh melampaui rata-rata selama satu dekade terakhir di kisaran 0,7-0,8%. Ketika menjabat menjadi Menhan, Prabowo juga pernah dilaporkan meminta anggaran untuk pengadaan persenjataan sebesar Rp1,7 kuadriliun yang diambil dari proyeksi seluruh anggaran pertahanan hingga 2044.

Artinya dalam satu tahun pertama, pemerintahan Presiden Prabowo kembali berusaha mengadakan terobosan pendanaan dan langsung tancap gas mencoba melepas 'rem moneter' yang diterapkan di pemerintahan sebelumnya. Keadaan ini tentu tidak hanya untuk mendukung program modernisasi pertahanan Indonesia, tetapi juga berbagai program utama Presiden Prabowo lainnya, seperti makan bergizi gratis (Rp335 triliun), Koperasi Merah Putih (Rp181,8 triliun), tiga juta rumah (Rp57,7 triliun), hingga upaya mencapai ketahanan energi (Rp402,4 triliun). Dalam debat klasik *gun vs butter*, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah keluar dari pakem dan mencoba bertaruh dalam memastikan sektor kesejahteraan sosial dan pertahanan sama-sama mendapatkan kucuran pembiayaan.

Pertaruhan ini membawa risiko yang besar bagi Indonesia, terutama jika kita melihat angka utang Indonesia ke depannya. Pada awal 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah

---

<sup>1</sup> Disiapkan oleh Reine Prihandoko (reine@lab45.id), Christian Guntur Lebang (guntur@lab45.id), dan Omar Farizi Wonggo (omar@lab45.id).

dibayangi oleh jatuh tempo utang yang ditarik pemerintahan sebelumnya. Meskipun demikian, Indonesia justru berencana menarik utang baru sebesar Rp781,9 triliun untuk tahun 2026, terbesar dalam lima tahun terakhir. Perencanaan utang luar negeri tahun depan sejatinya turun, namun tren sejak 2022 menunjukkan angka tersebut berpotensi tetap besar. Pada masa kampanye ketika masih menjadi calon presiden, Prabowo pernah menyinggung bahwa utang luar negeri Indonesia bisa dinaikkan lagi hingga menyentuh 50% dari PDB, atau 10% di bawah batas yang ditetapkan Undang-Undang. Meskipun demikian, selama ini persentase tersebut dijaga di kisaran 30-40% dari PDB. Permasalahannya, apakah utang-utang tersebut ditarik untuk menggerakkan ekonomi secara luas atau justru berpotensi menjadi investasi yang tidak produktif, termasuk dihabiskan untuk membayar utang-utang sebelumnya beserta bunganya.

Hal ini menjadi tantangan bagi Menteri Keuangan yang belum genap dua bulan menjabat. Pembiayaan sistem persenjataan menggunakan sepenuhnya utang luar negeri tanpa jaminan pemerintah melalui RMP akan sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah mencari sumber pinjaman luar negeri dengan kesepakatan, seperti tenor pembayaran dan tingkat suku bunga, yang tidak memberatkan perekonomian Indonesia ke depannya. Hal ini juga perlu ditopang oleh kebijakan ekonomi yang *prudent* dan meyakinkan calon pemberi pinjaman bahwa negara ini memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut pada masa yang akan datang. Apalagi jika mempertimbangkan utang luar negeri untuk pengadaan alutsista tidak memiliki dampak yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Lantas, apakah hasil dari pertarungan tersebut benar-benar setimpal dengan risikonya? Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak pernah secara gamblang menjelaskan ancaman nyata yang coba dihadapi dengan pengadaan berbagai sistem persenjataan di atas. Lebih dari sekadar jargon utama seperti Perisai Trisula Nusantara dan *Optimum Essential Force*, pemerintah perlu menjabarkan skenario konflik riil yang coba ditangkal. Jika tidak, publik tidak akan tercerahkan, apakah pengadaan besar-besaran ini betul-betul menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia atau sekadar upaya membangun pajangan persenjataan tanpa strategi yang koheren.

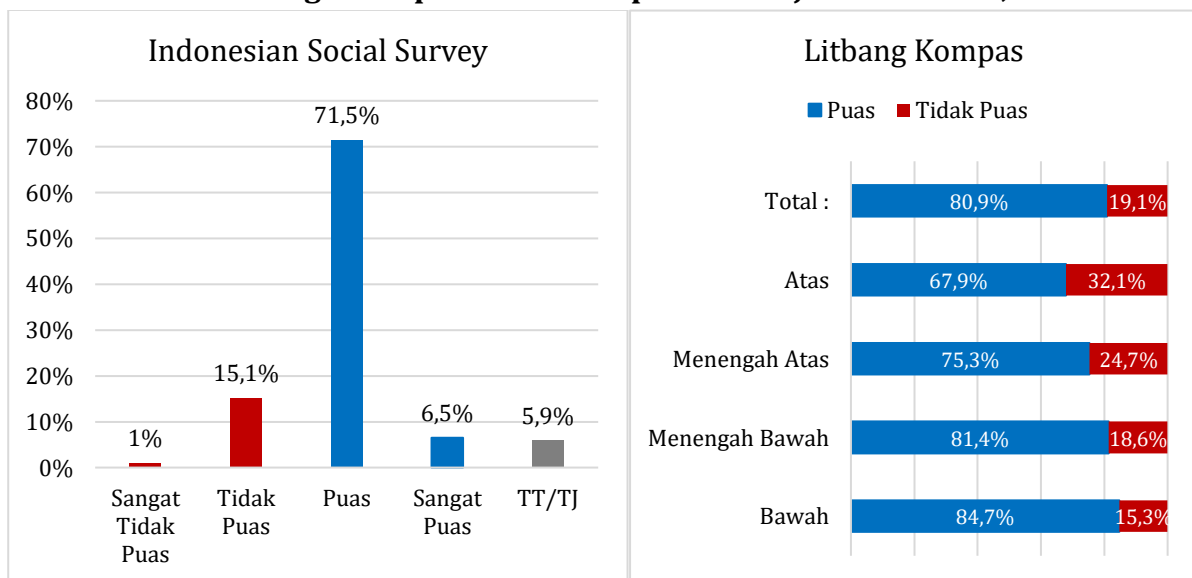
Sebagai mantan jenderal pasukan khusus TNI, Presiden Prabowo sepertinya memang gemar bertaruh dengan risiko tinggi guna mendapatkan hasil luar biasa. Pembangunan postur pertahanan pada awal masa pemerintahan ketika ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda ekspansi merepresentasikan selera Presiden Prabowo terhadap pertarungan tersebut. Adalah tugas Menteri Keuangan untuk memastikan Indonesia memiliki kartu yang cukup untuk memenangkan pertarungan ini dan tidak justru keluar dengan kerugian luar biasa.

## II. Evaluasi Bidang Politik Media

### Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Kepuasan Terjaga Namun Komunikasi Publik Kurang Siaga<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa rilis survei, dalam satu tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, tingkat kepuasan publik relatif terjaga dengan baik. Pertama survei Litbang Kompas pada 100 hari kerja pemerintah, tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%.<sup>3</sup> Kedua, survei Indonesian Social Survey (ISS) pada 11-20 Juli 2025, pemerintah mendapat apresiasi 78% kepuasan dari masyarakat.<sup>4</sup> Ketiga, menjelang satu tahun kinerja Kabinet Merah Putih, Indeks Politica merilis laporan survei yang menunjukkan kepuasan warga menembus hingga angka 83,5%.<sup>5</sup> Secara umum, kendati berfluktuasi, tiga hasil survei ini menggambarkan catatan positif di awal pemerintahan yang mendapat respons baik dari publik.

**Gambar 1. Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Pemerintah, 2025**



Sumber: Litbang Kompas dan Hasil Survei Indonesian Social Survey

Namun demikian, kepuasan tersebut tidak langsung tercermin jika meninjau bagaimana komunikasi publik pemerintahan yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tim Politik Media LAB 45 melakukan telaah terhadap komunikasi publik pemerintah sepanjang satu tahun terakhir. Analisis tersebut mengklasifikasikan berbagai bentuk blunder ke dalam tiga kategori utama: blunder kebijakan dan personal, blunder berdasarkan topik isu, serta blunder yang terjadi pada program-program prioritas pemerintah. Dalam konteks ini blunder kebijakan merujuk pada kesalahan dalam mengartikulasikan kebijakan pemerintah, sedangkan blunder

<sup>2</sup> Disiapkan oleh: Diyauddin (un@lab45.id), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani (gendis@lab45.id), Raisuddin (aiz@lab45.id), Ali Nuralizen (alizen@lab45.id), Salma Nihru (salma@lab45.id), Aldi Pahala Rizky (pal@lab45.id)

<sup>3</sup> Bestian Nainggolan, "Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Kepuasan Publik 80,9 Persen, Pemerataan Jadi Tantangan", *Kompas.id*, 20 Januari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/survei-100-hari-prabowo-gibran-kepuasan-publik-809-persen-pemerataan-jadi-tantangan>

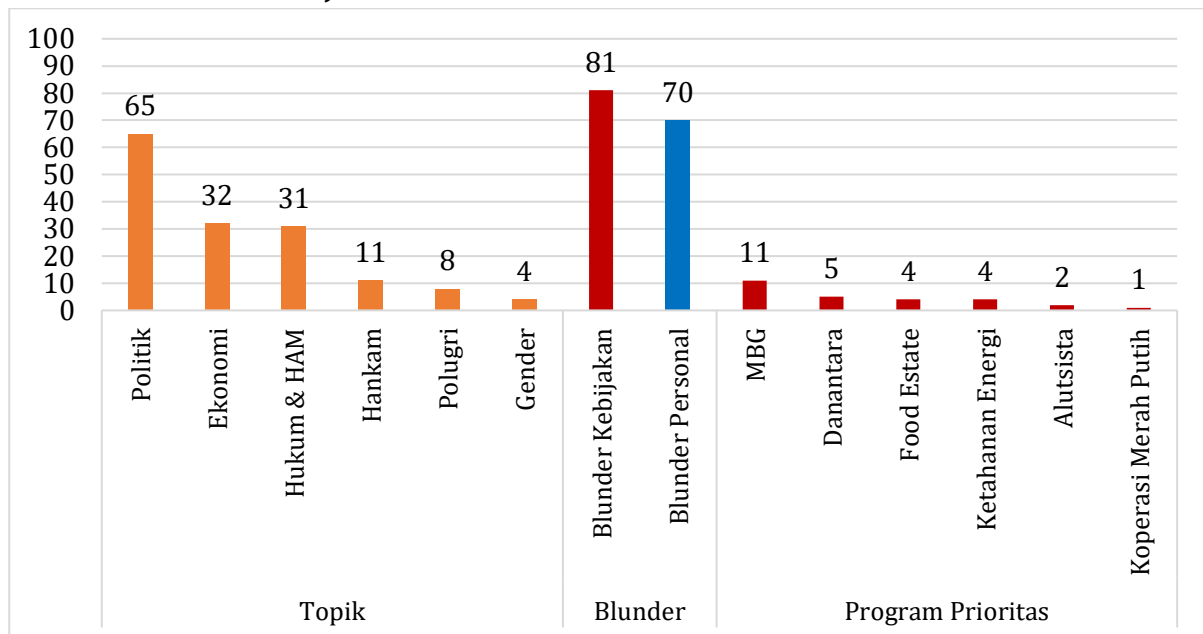
<sup>4</sup> Indra Komara, "Survei ISS: 78% Puas Kinerja Pemerintah di Bawah Kepemimpinan Prabowo", *Detik.com*, 21 Agustus 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8072471/survei-iss-78-puas-kinerja-pemerintah-di-bawah-kepemimpinan-prabowo>

<sup>5</sup> Tim Media Servis, "Kepuasan Publik 83,5%: Energi Topang Citra Tinggi Prabowo-Gibran", *Tirto.id*, 15 Oktober 2025, <https://tirto.id/kepuasan-publik-835-energi-topang-citra-tinggi-prabowo-gibran-hjGP>

personal terjadi ketika pejabat melakukan kesalahan komunikasi di luar konteks kebijakan, seperti pada isu-isu sosial atau politik lainnya.

Sejak Pemerintahan Prabowo-Gibran dilantik, blunder dalam artikulasi kebijakan tampak lebih menonjol dibandingkan kategori lainnya. Hal ini mengindikasikan implementasi kebijakan pemerintah tak selalu berjalan mulus. Presiden Prabowo Subianto kerap mengambil peran langsung untuk membatalkan atau merevisi sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dirancang dan dijalankan oleh para menternya.<sup>6</sup> Di sisi lain blunder personal yang dilakukan oleh sejumlah pejabat publik juga perlu mendapat perhatian serius, mengingat frekuensinya yang hampir sebanding serta sama-sama berpotensi menimbulkan kontroversi di ruang publik. Dalam sejumlah kasus, blunder pejabat publik juga terjadi karena pernyataannya yang tidak selaras dengan peran dan tugas pokok serta fungsinya.

**Gambar 2. Blunder Komunikasi Publik dan Kebijakan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo**



Sumber: Data Internal Lab45

Komunikasi publik penyelenggara negara masih menyebabkan polemik yang berisi respons nirempati di tengah krisis masyarakat.<sup>7</sup> Selain itu, pola komunikasi sebagian pejabat masih menunjukkan kecenderungan elitis dalam merespons isu maupun kritik masyarakat. Di saat bersamaan, pemerintah juga tampak belum memiliki tim komunikasi yang terkoordinasi dan terlatih dengan baik. Hal ini tercermin dari ketidaksiapan sejumlah pejabat ketika menghadapi pertanyaan langsung dari media (*doorstop interview*), yang kerap berujung pada pernyataan tidak konsisten dan kesalahan verbal. Di sisi lain silang pendapat antarpejabat dalam isu krusial juga masih terjadi. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan kuatnya ego

<sup>6</sup> Tim Harian Kompas, "Mengapa Komunikasi Publik Pemerintah Bermasalah?", *Kompas.id*, 4 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-komunikasi-publik-pemerintah-bermasalah>

<sup>7</sup> Yohanes Widodo, "Kegagalan komunikasi pemerintah: Rakyat butuh dialog empatik, bukan represi elitis", *Theconversation.com*, 11 Maret 2025, <https://theconversation.com/kegagalan-komunikasi-pemerintah-rakyat-butuh-dialog-empatik-bukan-represi-elitis-250655>

sektoral antar lembaga pemerintahan yang berdampak pada kebingungan publik.<sup>8</sup> Kondisi ini diperburuk oleh struktur komunikasi publik di lingkungan kepresidenan yang belum berfungsi optimal.

Evaluasi terhadap komunikasi publik pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan pola komunikasi yang kaya dengan narasi namun miskin artikulasi. Pola ini juga memperlihatkan kesenjangan antara upaya pencitraan dan kebutuhan komunikasi substantif yang seharusnya menjelaskan logika kebijakan, dampaknya bagi masyarakat, serta langkah-langkah pemerintah dalam menanggapi kritik dan aspirasi publik. Dalam hal ini, kami mendorong perbaikan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola komunikasi agar lebih terarah dan empatik. Beberapa rekomendasi kebijakan berikut diajukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, pemerintah perlu menetapkan juru bicara utama presiden dengan kewenangan penuh untuk menyelaraskan semua narasi dan data sebelum dirilis ke publik. Selain itu, perlu ditunjuk satu juru bicara yang bertanggung jawab atas keseluruhan program prioritas presiden (seperti MBG), serta juru bicara khusus untuk masing-masing program prioritas tersebut. Posisi ini penting untuk memastikan konsistensi pesan dan menghindari kontradiksi antarpejabat. Kedua, tim komunikasi secara rutin berkoordinasi dengan tim juru bicara utama presiden guna memastikan keseragaman informasi dan mencegah munculnya perbedaan pernyataan, terutama pada isu sensitif atau kebijakan strategis. Ketiga, menjadwalkan *Press Briefing* berkala dan tanggap krisis. Dalam situasi krisis atau isu mendesak, seperti kerusuhan akhir Agustus atau kebocoran percakapan diplomatik, *briefing* tambahan perlu dilakukan untuk menjaga transparansi dan kendali narasi publik.

Keempat, pemerintah perlu menstandarkan kualifikasi anggota tim komunikasi presiden agar diisi oleh profesional dengan latar belakang komunikasi politik dan pengalaman dalam manajemen isu publik. Kelima, pejabat negara perlu disiplin dalam membedakan opini pribadi dengan posisi resmi pemerintah. Pernyataan publik sebaiknya berlandaskan data dan kebijakan, bukan preferensi personal, untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik. Keenam, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antar lembaga agar tidak terjadi lagi penarikan kebijakan oleh presiden akibat miskomunikasi, seperti dalam kasus PPN 12% dan distribusi gas LPG 3 kg. Ketujuh, dalam situasi krisis, pemerintah perlu mengedepankan narasi yang menenangkan, inklusif, dan berempati terhadap publik. Komunikasi yang sensitif terhadap persepsi masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan dan memperkecil risiko resistensi sosial.

---

<sup>8</sup> Rhama Purna Jati, "Kontroversi Pagar Laut, Bukti Miskoordinasi Antarlembaga Pemerintah", *Kompas.id*, 21 Januari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kontroversi-pagar-laut-bukti-nyata-adanya-miskoordinasi-antar-lembaga-pemerintah>

### III. Evaluasi Bidang Ekonomi Politik

#### Statistik yang “Cantik”, Hari-hari yang Pahit<sup>9</sup>

*One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results*

Milton Friedman

#### Gambaran Evaluasi Makro Setahun Terakhir

Evaluasi atas kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran selama satu tahun menunjukkan adanya perbedaan antara angka statistik makro yang stabil dengan indikator mikro yang mengkhawatirkan. Kondisi ini terefleksikan dari data makro yang masih berada tingkat yang aman. Sejak Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024, perekonomian dihadapkan dengan pelbagai gejolak seperti kebijakan proteksionisme melalui tarif Trump di Amerika Serikat, eskalasi konflik Timur Tengah, hingga rangkaian demonstrasi dalam negeri yang sempat menekan sentimen pasar. Di sisi lain, data mikroekonomi menunjukkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang dicerminkan melalui tren pelemahan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) serta tren peningkatan PHK. Kajian singkat ini akan membahas perbedaan antara stabilitas kondisi makro dengan kondisi hari-hari masyarakat yang menunjukkan kesulitan.

Ekonomi Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2025 mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 5,0 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga momentum pertumbuhan di tengah perlambatan global. Meski sejumlah lembaga internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih konservatif pada kisaran 4,8-4,9 persen untuk tahun 2025, perekonomian domestik tetap solid dan masih berada di atas rata-rata ASEAN. Lebih jauh, pemerintah berhasil menjaga laju pertumbuhan di atas titik kritis yang dalam perhitungan LAB 45 sebesar 4,73 persen, meski akselerasinya masih tergolong moderat dibandingkan target APBN 2025. Dengan target 5,2 persen, maka ekonomi Indonesia perlu tumbuh sekitar 5,4 persen pada dua kuartal tersisa untuk mencapai sasaran tersebut.

Di sisi lain, indikator ketenagakerjaan terus menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,76 persen per Februari 2025, menggambarkan perbaikan penyerapan tenaga kerja seiring pulihnya aktivitas ekonomi dan ekspansi investasi domestik. Optimisme pelaku usaha juga tercermin dari kinerja pasar keuangan di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 8.118,3, level tertinggi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Stabilitas sektor keuangan yang ditandai dengan meningkatnya likuiditas serta turunnya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) juga memberikan sinyal positif bagi prospek fundamental ekonomi ke depan.

Berbicara mengenai penguatan fundamental ekonomi, peran Bank Indonesia tidak dapat diabaikan. Dari sisi stabilitas harga, inflasi umum per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen secara tahunan. Angka tersebut cenderung naik dibanding bulan-bulan sebelumnya, tetapi masih berada dalam rentang target otoritas moneter  $\pm 1,5-3,5$  persen. Perlu diakui bahwa koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia berjalan efektif dalam menjaga stabilitas harga, utamanya pada komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, telur, dan hortikultura. Terkendalinya inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Sementara itu, nilai tukar Rupiah

---

<sup>9</sup> Disiapkan oleh Radhityana Muhammad (radhit@lab45.id); Indah Lestari Saani (indah@lab45.id); Baginda Muda Bangsa (bagin@lab45.id); Jessica Arreta (ja@lab45.id)

relatif stabil di kisaran Rp16.500 per Dolar AS. Meski sedikit melemah dibandingkan asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000 per Dolar AS, langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia berhasil menahan volatilitas dan menjaga kepercayaan investor.

Lebih jauh, mandat baru yang diberikan melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) mendorong BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2025, BI telah mengadopsi sejumlah kebijakan *pro-growth* dengan menurunkan BI Rate sebanyak enam kali untuk mendorong akselerasi permintaan domestik, memperluas implementasi Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, serta melanjutkan skema *burden sharing* dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kelancaran pembiayaan fiskal.

**Tabel 1. Ringkasan Kondisi Makro Nasional**

Indikator	Kondisi Terkini	Titik Kritis*	Penilaian
Pertumbuhan Ekonomi	Q2-2025: 5,12%	4,73%	Stabil dan berdaya tahan, namun akselerasi perlu dijaga agar target tahunan 5,2% tercapai
Inflasi	September 2025: 2,65%	±1,5-3,5%	Terkendali, tetapi perlu mewaspadaikan tekanan harga pangan ke depannya
Tingkat Pengangguran	Februari 2025: 4,76%	-	Relatif rendah dan terus mengalami penurunan semenjak Covid-19 yang menandakan perbaikan pasar kerja
Harga Minyak Bumi WTI	60,88 Dolar AS	90,2 Dolar AS	Berdampak positif terhadap postur fiskal
Kurs Rupiah terhadap Dolar AS	Rp16.611	Rp17.710	Meski berada di bawah titik kritis, depresiasi Rupiah perlu diwaspadai karena melewati asumsi makro Rp16.000 dalam APBN 2025
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	8.118,3	-	Menguat yang mencerminkan sentimen pasar cukup optimis

\* Titik kritis dihitung berdasarkan batas atas dan batas bawah dari asumsi makro dalam APBN 2025

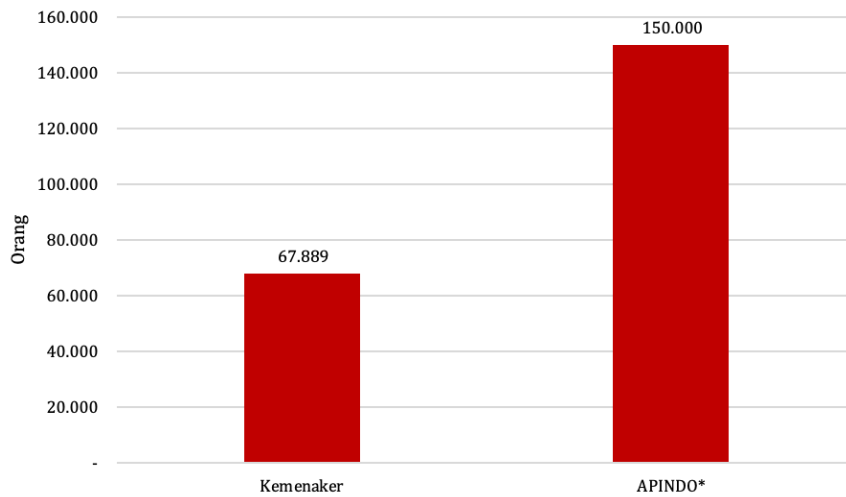
### Kegelisahan Masyarakat

Walaupun secara makro kondisi perekonomian tetap menunjukkan stabilitas, indikator mikroekonomi mencerminkan hal yang berbeda. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terjadi dinamika ekonomi yang berfluktuatif. Instabilitas dalam lingkup mikro tercermin dari pelemahan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh tingginya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tren pelemahan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja.

Selanjutnya, kondisi ekonomi sedikit terguncang dengan fenomena penurunan daya beli masyarakat dalam satu tahun terakhir ini. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh PHK yang masif. Penurunan jumlah pemudik pada tahun 2025 juta mencerminkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK dalam kurun waktu Oktober 2024-Agustus 2025 mencapai lebih dari 64 ribu orang. Kenaikan tingkat PHK ini terjadi paling parah pada Desember 2024 –

Februari 2025. Sebagai catatan tambahan, terjadi perbedaan klaim jumlah PHK antara Kemenaker dan APINDO, mereka menyebutkan bahwa jumlah PHK yang terjadi sejak Januari 2025 hingga Juni 2025 ini sudah mencapai 150 ribu orang. Seiring dengan tingginya PHK, pelemahan skor Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia pada periode yang sama. Skor PMI Indonesia sempat berada di zona kontraksi selama empat bulan beruntun yaitu dari Maret hingga Juni yang berada di bawah angka 48, hal ini menandakan adanya pelemahan pada aktivitas sektor industri manufaktur domestik.

**Bagan 1. Klaim PHK Kemenaker dan APINDO Tahun 2**

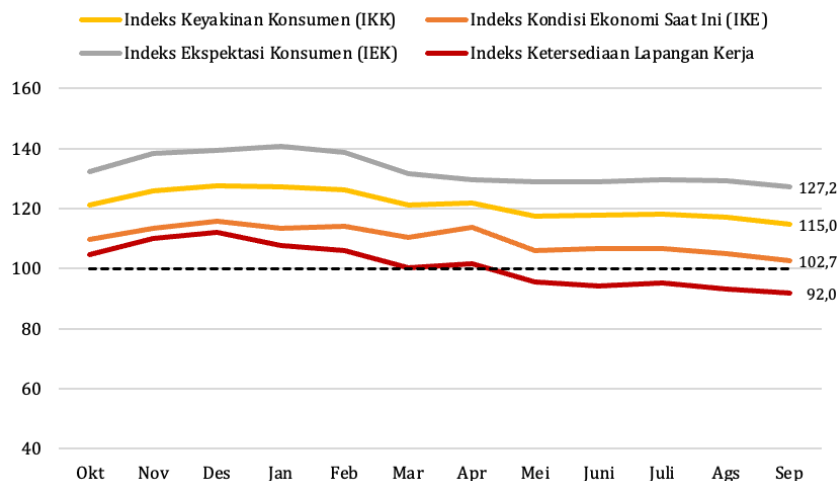


\*Januari 2025-Juni 2025

Sumber: Kemenaker (2025) dan CNBC (2025)

Pelemahan daya beli juga terefleksikan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam satu tahun terakhir. IKK selama tahun 2025 berada pada tren yang melemah meski masih tetap berada pada zona optimis (lebih dari 100). Tren pelemahan juga terjadi pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Bila dilihat lebih dalam, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja berada pada zona pesimis (di bawah 100) sejak bulan Mei 2025. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pengambil kebijakan, karena pesimisme yang terjadi pada kelompok usia produktif yaitu 20 tahun hingga 40 Tahun.

**Bagan 2. Pergerakan IKK, IKE, IEK, dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja**



Sumber: Bank Indonesia (2025)

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi ketenagakerjaan serta daya beli masyarakat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia bukanlah sekedar luapan emosi semata, melainkan akumulasi dari kecemasan melihat masa depan ekonomi mereka. Ada perasaan tidak berdaya melihat tangga sosial yang patah.

### **Ke mana Dampak Program Unggulan Ekonomi Prabowo?**

Pada awal tahun 2025, Presiden melakukan “efisiensi” anggaran dengan memotong belanja pemerintah yang dianggap tidak produktif. Nilai efisiensi yang mencapai Rp306,7 triliun kemudian disalurkan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara. Kebijakan yang “memangkas” belanja rutin Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah berdampak kepada lesunya industri perhotelan dan UMKM yang biasanya bergantung kepada kegiatan pemerintah.

Pada dasarnya realokasi anggaran terhadap program-program unggulan Presiden berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efek pengganda (*multiplier effect*). Sebagai contoh apabila mencermati rantai pasok dari MBG, maka dapat diidentifikasi bagaimana program ini seharusnya dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan, memperluas kesertaan UMKM, mendorong tumbuhnya bisnis logistik. Di sisi lain program seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didesain untuk memotong rantai pasok kebutuhan di desa/kelurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar koperasi. Sementara itu, dibentuknya Danantara dapat menjadi daya tawar untuk melakukan investasi melalui konsolidasi aset publik sekaligus melakukan efisiensi operasional BUMN.

Namun, implementasi di lapangan belum berjalan mulus, sebagaimana terlihat dari respons negatif publik yang dimuat dalam pelbagai media dan serapan anggaran yang rendah. Dalam laporan APBN Kita yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pada bulan Oktober 2025, serapan anggaran MBG masih sekitar Rp20,6 triliun atau sekitar 29% dari pagu anggaran Rp71 triliun. Serapan yang rendah juga terjadi di program-program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran lainnya.

Danantara yang digadang-gadang menjadi “mesin” baru pembangunan belum bisa bekerja secara efektif. Dividen yang diperoleh Danantara dari BUMN sekitar Rp90 triliun belum tersalurkan untuk investasi produktif. Hal ini menyebabkan *opportunity lost* dalam penyaluran dividen untuk program-program produktif.

Walaupun memiliki potensi ekonomi yang besar, program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Perencanaan program yang belum matang dan implementasi yang tergesa-gesa menyebabkan efektivitas program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang rendah.

Ditambah lagi dengan lemahnya kerangka institusional dan payung hukum turunan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik membuka peluang terjadinya rente ekonomi. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan dan pertumbuhan yang inklusif, program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran justru berisiko terkonsentrasi manfaatnya pada segelintir pihak yang memiliki akses politik dan birokratik.

Kondisi ini menggerus kepercayaan terhadap agenda dan kebijakan pemerintah. Mengutip John Maynard Keynes, perekonomian sangat dipengaruhi oleh “*animal spirit*”—psikologis dari pelaku ekonomi yang menggambarkan keyakinan, harapan, dan ketakutan—untuk

melakukan konsumsi dan investasi. Data mikro ekonomi yang telah dijabarkan secara jelas menunjukkan kondisi *animal spirit* yang lemah. Seperti kapal yang bocor bukan karena badai, tetapi karena lubang di lambungnya sendiri. Kredibilitas dan komitmen pemerintah dalam menjalankan program-programnya menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, kebijakan stimulus yang sedang dilakukan oleh Menteri Keuangan berpotensi mendapat respons tidak optimal. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah konkret jangka pendek untuk mengembalikan *confidence* terhadap kebijakan pemerintah.

### **Langkah ke Depan**

Berdasarkan temuan dua permasalahan utama, kami menawarkan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, terkait penurunan daya beli masyarakat akibat keterbatasan lapangan kerja dan lonjakan PHK di tengah pelemahan ekonomi. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu **memastikan keberadaan dan aksesibilitas lapangan kerja secara nyata**. Salah satu langkah krusial yakni dengan mengintegrasikan target penyerapan tenaga kerja dalam desain dan pelaksanaan program *flagship* pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, Koperasi Desa Merah Putih, Ketahanan Energi, dan Danantara. Harapannya, program unggulan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai agenda pembangunan, tetapi juga sebagai motor penciptaan tenaga kerja yang terukur.

Selanjutnya, pemerintah dapat mobilisasi proyek padat karya di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi dan memperluas cakupan program magang dan pelatihan transisi kerja bagi lulusan baru dan korban PHK. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pemulihan daya beli masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Namun, penciptaan lapangan kerja tidak akan berkelanjutan tanpa kepastian hukum yang mendorong tumbuh kembang investasi secara produktif. Stabilitas regulasi dan kejelasan tata kelola menjadi prasyarat strategis untuk memperluas basis penciptaan kerja dan menarik investor. Dalam konteks ini, kami menaruh harapan besar kepada Danantara sebagai katalis yang mampu menghasilkan *multiplier effect* nyata dalam sektor ketenagakerjaan Indonesia.

Kedua, sebagai upaya **mendorong transparansi program pemerintah dan membangun kepercayaan masyarakat**, perlu dijembatani gap antara intensi kebijakan dan implementasi. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah meluncurkan *dashboard* lintas sektor yang secara terbuka menampilkan progres, kendala, dan alokasi sumber daya dari program-program *flagship*. Transparansi ini memiliki arti penting bukan hanya sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi lintas lembaga.

Selain itu, penyelenggaraan forum rutin antara pemerintah dan publik menjadi krusial untuk memaparkan capaian serta menyerap masukan secara partisipatif. Forum ini dapat menjadi ruang dialog yang memperkuat kepercayaan dan mempercepat respons terhadap dinamika di lapangan.

Terakhir, kami menyadari bahwa **masih terlalu dini** untuk menilai kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran secara menyeluruh saat ini. Meskipun masa transisi dari pemerintahan sebelumnya berlangsung relatif panjang dan ditopang oleh tim transisi yang berjalan cukup mulus, APBN 2025 tetap merupakan produk transisi yang belum sepenuhnya mencerminkan arah kebijakan pemerintahan baru. Sejumlah kebijakan strategis pun masih belum sepenuhnya mencerminkan arah baru. Oleh karena itu, APBN 2026 yang disusun secara penuh oleh kabinet saat ini akan menjadi titik evaluasi yang lebih adil dan strategis.

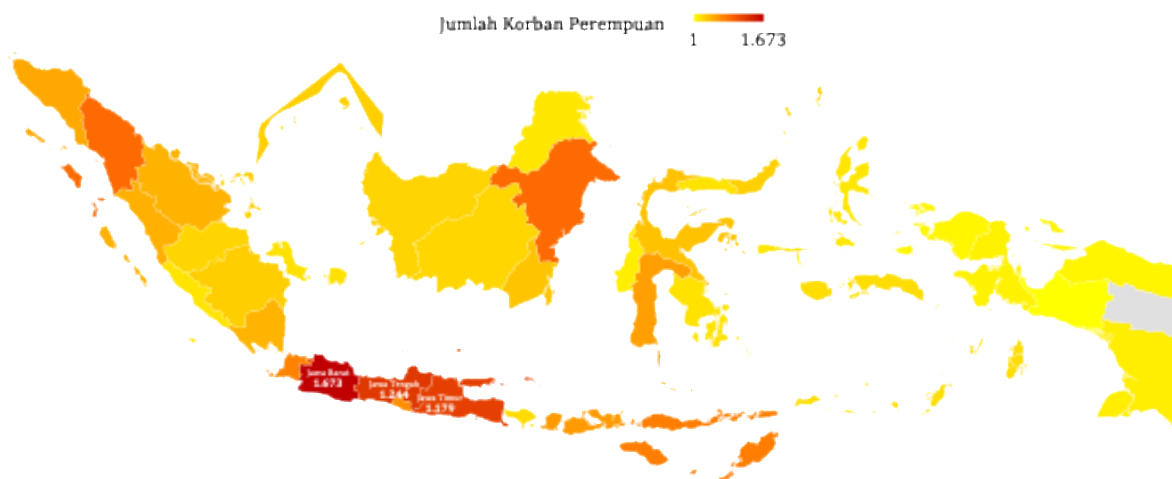
#### IV. Evaluasi Bidang Gender/Pemberdayaan Perempuan

##### Perlindungan Perempuan: Landasan Arah Baru Pemerintahan Prabowo-Gibran<sup>10</sup>

Pada tahun pertamanya, Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada ujian nyata terhadap komitmennya dalam isu perlindungan perempuan. Di balik visi besar menuju Indonesia Emas 2045, masih tampak jurang antara janji dan kenyataan. Ketika angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, dan munculnya berbagai permasalahan dalam program sosial, Kementerian/Lembaga (K/L) perlindungan perempuan dan kelompok marginal justru mengalami pemangkasan anggaran. LAB 45 menilai, arah baru pemerintahan hanya dapat disebut berpihak pada rakyat jika keberpihakan itu dimulai dari perlindungan perempuan, yang suaranya kerap tidak didengarkan di ruang-ruang pengambilan keputusan. Perlindungan perempuan bukan hanya bagian dari agenda kesetaraan, melainkan tolok ukur moral sebuah pemerintahan, yakni sejauh mana negara bersedia menjaga kehidupan yang paling rentan sebagai dasar dari demokrasi yang hidup.

Dari 1 Januari hingga 15 Oktober 2025, data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa terdapat 15.852 korban perempuan, dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi. Jenis kekerasan didominasi kekerasan seksual—7.183 kasus. Ironisnya, fenomena ini paling banyak terjadi di pusat pemerintahan, Pulau Jawa.

**Gambar 1. Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan, 2025**



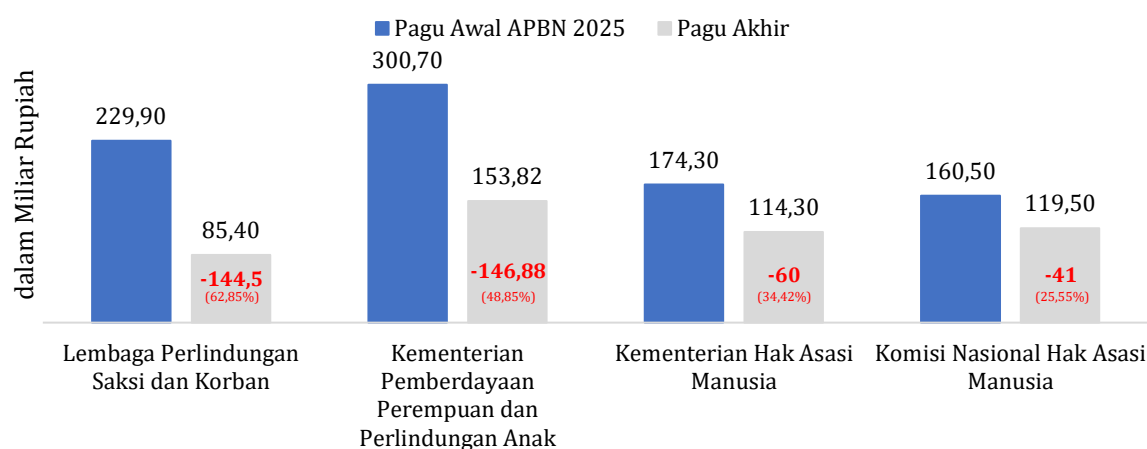
Sumber: Simfoni-PPA (2025)

Melalui Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kesetaraan gender disebut sebagai strategi lintas sektor menuju Indonesia Emas 2045. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)

<sup>10</sup> Disiapkan oleh Ratu Dyah Ayu Gendiswardani (gendis@lab45.id), Aldi Pahala Rizky (pal@lab45.id), dan Salma Salima Nihru (salma@lab45.id)

diarahkan untuk memperbaiki gizi ibu-anak melalui pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Namun, pelaksanaannya menghadapi kritik lantaran, berdasarkan data lembaga *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) per 9 Oktober 2025, sebanyak 9.890 anak keracunan akibat MBG. Jawa Barat menjadi wilayah dengan persentase keracunan tertinggi (40,62%), diikuti oleh Jawa Tengah (10,60%), Daerah Istimewa Yogyakarta (10,60%), Nusa Tenggara Timur (7,25%), Lampung (6,06%), dan Bengkulu (5,45%). *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI), per 25 September 2025, juga memberikan laporan yang sama, di mana Jawa Barat menjadi wilayah yang mendominasi kasus keracunan MBG, yang menjadi ironis karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang paling dekat dengan Ibu Kota Indonesia. Namun, implikasi lainnya yang lebih penting adalah bagaimana perempuan, terutama bagi kelompok ibu rumah tangga, menanggung beban tambahan dalam mengurus anak-anak mereka yang keracunan akibat MBG. Tidak hanya itu, sebagai penerima manfaat MBG juga, para ibu hamil juga mengalami keracunan, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini diakibatkan oleh tata kelola yang lemah, terutama karena ketiadaan ahli gizi dalam struktur utama kepengurusan Badan Gizi Nasional (BGN). Dominasi militer dalam tubuh BGN diakui oleh Kepala BGN sebagai strategi untuk mendorong distribusi MBG “ekstra cepat”. Namun, ini justru memperkuat landasan penolakan MBG dari masyarakat bahwa program ini terkesan buru-buru tanpa perancangan yang matang.

**Gambar 2. Pemangkasan Anggaran K/L terkait Perlindungan Perempuan**



Sumber: Nota Keuangan APBN 2025; RDP DPR RI (2025)

Pemotongan anggaran terhadap K/L yang menangani isu perempuan, serta orientasi program yang tidak berbasis bukti ilmiah, yang ditujukan untuk program utama, seperti MBG, menunjukkan lemahnya integrasi gender dalam kebijakan publik. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya tambahan anggaran yang diberikan kepada K/L terkait perlindungan perempuan pada semester dua pemerintahan Prabowo. Alih-alih menyetujui penambahan untuk lembaga seperti KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan LPSK yang justru mengalami pemangkasan, pemerintah memperbesar alokasi bagi sektor pertahanan dan keamanan—antara lain Kementerian Pertahanan yang naik hingga Rp247,5 triliun dan Polri hingga Rp138,5 triliun—menunjukkan pergeseran prioritas fiskal yang tidak sejalan dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditambah dengan program

Koperasi Desa Merah Putih—mencapai Rp200 triliun—yang juga dipertanyakan oleh publik mengenai fungsinya dalam mendorong perekonomian masyarakat akar rumput.

Oleh karena itu, LAB 45 memberikan rekomendasi cepat untuk tindak lanjut permasalahan perempuan di atas. Pertama, Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), harus mengkaji ulang program Ruang Bersama Indonesia (RBI) agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata perempuan di akar rumput, dibandingkan hanya menyuarkan RBI yang notabene ditujukan untuk perencanaan jangka panjang.

Selanjutnya, pemerintah dapat menghentikan sementara program MBG hingga tata kelola dan struktur kepemimpinan BGN diperbaiki dengan diisi oleh ahli gizi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kami juga melihat sebuah ironi ketika program MBG telah berjalan, dan memakan korban, tetapi Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Program MBG baru dinyatakan rampung oleh Kepala BGN pada Selasa (21/10/2025). Perpres ini salah satunya mengatur mengenai sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan. Walaupun begitu, peraturan ini dinyatakan baru akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Peluncuran program seperti ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Kebijakan gizi harus berbasis ilmu, bukan sekadar percepatan sesaat, sehingga anak-anak hingga ibu hamil tidak lagi menjadi bahan percobaan, di mana mereka harus merasakan keracunan, karena ini menyangkut masa depan mereka. Masih berkaitan dengan MBG, pemerintah perlu membangun sistem perlindungan terpadu, transparan, dan responsif jika masih terjadi kasus-kasus keracunan pada masa mendatang. Program baik ini memang perlu diperhatikan khusus jika pemerintah menanggapnya sebagai program utama untuk masa depan bangsa.

Namun, alangkah baiknya jika pemerintah memperlakukan program ini secara efektif sehingga dana-dana besar yang telah digelontorkan pemerintah terhadap MBG dapat didistribusikan kepada kantung-kantung lain, seperti penguatan K/L atau lembaga independen—KEMENPPPA dan Komnas Perempuan. Penguatan bisa dilakukan dengan memberikan anggaran memadai, pelatihan/perekrutan sumber daya manusia (SDM) terlatih dan penguatan kapasitas operasional KEMENPPPA di daerah, serta menjaga independensi lembaga seperti Komnas Perempuan. Perlu menjadi perhatian bahwa distribusi anggaran untuk penguatan K/L di atas tidak terjadi jika pemerintah tidak menetapkan isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan sebagai prioritas kebijakan strategis—*gender mainstreaming* dan *gender budgeting*.

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi di daerah-daerah, pemerintah pusat juga perlu mempertahankan terpisahnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial di daerah-daerah. Peleburan hanya akan mengaburkan isu gender di bawah logika kesejahteraan sosial. Dinas Perempuan perlu tetap otonom sebagai penggerak pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah. Akan tetapi, sebelum lebih jauh dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, satu hal penting perlu diakui oleh pemerintah untuk menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam isu perlindungan terhadap perempuan. Hal itu tidak lain adalah pemerkosaan massal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada masa lalu.

Terakhir, pemerintah perlu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi jutaan perempuan PRT dari kekerasan fisik,

psikis, dan ekonomi. Pengesahan ini adalah pengakuan negara atas nilai ekonomi pekerjaan domestik, dan mengatasi penindasan yang selama ini dirasakan oleh perempuan akibat stereotip masyarakat yang menormalisasikan kerja perawatan perempuan yang tidak dihargai.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi fondasi demokrasi substansial. Negara harus menempatkan keadilan gender sebagai dasar arah pembangunan dan pemerintahan baru. Perlindungan perempuan berarti melindungi masa depan demokrasi Indonesia.

## **Tentang Laboratorium Indonesia 2045**

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

Konsentrasi riset LAB 45 adalah berbagai perkembangan seputar politik keamanan dan ekonomi politik. Topik-topik dalam studi politik keamanan meliputi politik konstituen, politik luar negeri, strategi pertahanan, keamanan maritim, radikalisme dan separatisme. Ruang lingkup kajian ekonomi politik antara lain blok perdagangan, liberalisasi ekonomi, politik fiskal dan moneter, kemaritiman, pembangunan berkelanjutan, serta peran badan usaha milik negara. LAB 45 juga membangun kapasitas dan kolaborasi dengan komunitas epistemik yang memiliki perhatian terhadap perkembangan global dan nasional.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Sekretariat LAB 45

Telepon: +62 811 4520 45

Email: [lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id)

Website: [www.lab45.id](http://www.lab45.id)

Instagram: [lab45.id](https://www.instagram.com/lab45.id)

Facebook: Laboratorium Indonesia 2045

X: [@lab45\\_](https://x.com/lab45_)